

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang penulisan skripsi. Latar belakang berisi tentang otonomi daerah sebagai dasar pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan asli daerahnya. Identifikasi masalah yang digunakan merupakan pertanyaan dari masalah yang ada dan batasan masalah digunakan untuk mempersempit kriteria masalah.

Bab ini juga membahas tentang batasan penelitian dan rumusan masalah yang berisi tentang kriteria yang digunakan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik secara konsisten. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai melalui penelitian ini, dan manfaat penelitian terdiri dari manfaat yang didapatkan bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat tercapai jika pembangunan dilaksanakan secara merata. Sistem pemerintahan yang berorientasi kepada pusat telah menyebabkan adanya kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sejak tahun 1999 telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia khususnya pada pemerintahan daerah. Perubahan tersebut adalah dilaksanakannya otonomi daerah secara luas melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.





Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara membebaskan daerah kewenangan yang lebih luas dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah pusat dalam konteks ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan upaya untuk meminimalisasi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan salah satu kewenangan kepada pemerintah daerah di bagian keuangan. Keuangan adalah salah satu faktor utama keberhasilan realisasi otonomi daerah. Kemandirian keuangan menjadi kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diantaranya terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - a. Pajak daerah,
 - b. Retribusi daerah,



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Dana Perimbangan,

Pinjaman Daerah, dan

Pendapatan lain-lain yang sah.

Kemandirian keuangan ditandai dengan semakin besarnya persentase nilai Pendapatan Asli Daerah dan semakin menurunnya persentase dukungan pusat dalam bentuk sumbangan / bantuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2012

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun Realisasi Anggaran		
	Realisasi 2010	Realisasi 2011	Realisasi 2012
▪ Pendapatan Asli Daerah	12.891.992.182.041	17.825.987.294.430	22.040.801.447.924
▪ Dana Transfer	10.133.994.811.087	10.462.963.410.649	13.334.647.270.804
▪ Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	8.410.777.790	3.731.333.261
Jumlah	23.025.986.993.128	28.297.361.482.869	35.379.180.051.989

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk menetapkan target penerimaan pendapatan seyogyanya dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap potensi daerah yang ada. Hal lain yang perlu dipertimbangkan

dalam menetapkan target penerimaan adalah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Peningkatan target akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, namun juga berarti menambah beban masyarakat, karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Sumber pendapatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Pajak Daerah. Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengolah pajak daerah dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah,
5. Pajak Hotel,
6. Pajak Restoran,
7. Pajak Hiburan,
8. Pajak Reklame,
9. Pajak Penerangan Jalan,
10. Pajak Parkir, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah daerah Jakarta merupakan salah satu daerah otonom yang menjalankan program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan

program tersebut tergantung kepada ketersediaan dan kesinambungan dana yang besar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Jakarta berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.

Kota Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa kendaraan bermotor banyak diperlukan dalam berbagai kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan.

Jakarta juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari bertumbuhnya kota-kota satelit di sekitar daerah Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kota satelit adalah sebuah kota yang meskipun merupakan komunitas mandiri, sebagian besar penduduknya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Biasanya penghuni kota satelit ini adalah komuter dari kota besar tersebut. Pertumbuhan komuter juga berbanding lurus dengan kebutuhan atas alat transportasi, sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi pendapatan yang potensial untuk dikembangkan pemerintah daerah Jakarta.

Potensi pendapatan daerah yang lain juga terdapat pada pajak hotel. Globalisasi yang berdampak pada penambahan jumlah perusahaan asing maupun perusahaan multinasional menyebabkan bertambahnya kunjungan bisnis ke Jakarta. Selain itu, beberapa obyek wisata unggulan di Jakarta seperti Ragunan, Monas, Ancol, maupun TMII juga salah satu faktor yang menarik minat pengunjung dari luar Jakarta, baik pengunjung dalam negeri



maupun mancanegara. Semuanya berdampak pada bertambahnya kebutuhan akomodasi yang juga menambah pendapatan pemerintah daerah atas pajak hotel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Pos-pos dalam Pajak Daerah yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2010-2012**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penerimaan apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta?
4. Bagaimana perkembangan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta?
5. Seberapa besar peranan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta?
6. Apakah realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan?
7. Apakah anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel yang ditentukan telah sesuai dengan potensi?

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Apa saja hal-hal yang menjadi penghambat dalam usaha pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka akan diambil beberapa batasan masalah yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta?
2. Bagaimana perkembangan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta?
3. Seberapa besar peranan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta?
4. Apakah realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan?
5. Apakah anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel yang ditentukan telah sesuai dengan potensi?

D. Batasan Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang terfokus dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian dimana dalam penelitian ini, obyek yang diamati adalah data anggaran dan realisasi pada penerimaan pendapatan asli daerah dan pajak kendaraan bermotor serta pajak hotel di wilayah DKI Jakarta. Data lainnya yang diamati sebagai obyek penelitian adalah data pertumbuhan kendaraan bermotor dan pertumbuhan tingkat hunian hotel di wilayah pemerintah daerah DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah pemerintahan DKI Jakarta tahun 2010-2012 (3 tahun).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dan perkembangan pajak kendaraan bermotor serta pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, berapa besarnya peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apakah realisasi pendapatan telah sesuai dengan anggaran, serta apakah anggaran pajaknya telah sesuai dengan potensi yang ada?”

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2010-2012.
- Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012.
- Untuk mengetahui seberapa besar peranan dan bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2010-2012.
- Untuk mengetahui apakah realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Untuk mengetahui apakah penetapan anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah sesuai dengan potensi yang ada.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerimaan pendapatan daerah dan memberikan gambaran evaluasi yang lebih jelas kepada pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan untuk melihat pengaruh pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pembentukan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta hambatan yang timbul dalam optimalisasi penerimaannya di wilayah DKI Jakarta.

Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.